

PROGRAM PEACE CORPS SEBAGAI DIPLOMASI PUBLIK AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA TAHUN 2016-2020

Defikri Natadiwangsa¹, Chandra Purnama², Akim³

¹Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional, FISIP, UNPAD, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363

^{2,3}Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, UNPAD, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363

Email: defikri.natadiwangsa94@gmail.com

Submitted: 23-02-2023; Accepted: 01-03-2023; Published : 10-03-2023

ABSTRAK

Artikel ini memberikan penjelasan mengenai Program Peace Corps yang diadakan di Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan diplomasi publik Amerika Serikat (AS). Program Peace Corps dilaksanakan di sekolah/madrasah di tiga provinsi, di Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Salah satu madrasah yang menjalin kerjasama terkait Program Peace Corps adalah MAN 1 Darussalam Ciamis, program ini dilaksanakan oleh Relawan Peace Corps (PCVs) berkebangsaan AS yang didatangkan untuk membantu sekolah atau madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama di bidang Pengajaran Bahasa Inggris. Selain itu, program ini juga telah menangkal citra atau anggapan tidak baik yang ada dalam benak Muslim di Indonesia terhadap AS pasca terjadinya peristiwa 9/11. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif sebagai teknik analisis data dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi lapangan serta studi pustaka. Program Peace Corps di Indonesia dianalisis menggunakan struktur diplomasi publik yang disajikan Eytan Gilboa dengan hasil bahwa diplomasi publik AS tergolong ke dalam diplomasi publik jangka panjang dengan waktu beberapa tahun yang bertujuan untuk membangun hubungan - membangun citra baik dengan Muslim Indonesia. hubungan dibangun dengan cara mengirimkan relawan Peace Corps (*exchange*) ke sekolah/madrasah untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat Muslim Indonesia.

Kata kunci: Diplomasi Publik; Peace Corps; Amerika Serikat; Indonesia

ABSTRACT

*This article provides an explanation of the Peace Corps Program held in Indonesia as a form of United States (US) public diplomacy. The Peace Corps program is implemented in schools/madrasas in three provinces, in West Java, East Java and East Nusa Tenggara. One of the madrasas that collaborated with the Peace Corps Program was MAN 1 Darussalam Ciamis, this program was implemented by US-based Peace Corps Volunteers (PCVs) who were brought in to assist schools or madrasas in improving the quality of education, especially in the field of English Language Teaching. Apart from that, this program has also counteracted the bad image or perception that exists in the minds of Muslims in Indonesia towards the US after the events of 9/11. This study used a qualitative-descriptive research method as a data analysis technique and data collection techniques were carried out by means of interviews, field observations and literature studies. The Peace Corps program in Indonesia was analyzed using the public diplomacy structure presented by Eytan Gilboa with the result that US public diplomacy belongs to long-term public diplomacy with a period of several years which aims to build relationships - build a good image with Indonesian Muslims. relationships built by sending Peace Corps (*exchange*) volunteers to schools/madrasas to interact directly with the Indonesian Muslim community.*

Keyword : Public Diplomacy, Peace Corps, USA, Indonesia

Doi:10.24198/aliansi.v2i1.45542

PENDAHULUAN

Peace Corps Volunteers (PCVs) telah mengajar bahasa Inggris di seluruh dunia selama lebih dari setengah abad. Ketika Peace Corps dibentuk melalui penandatanganan Perintah Eksekutif oleh Presiden John Kennedy pada tanggal 1 Maret 1961, organisasi layanan internasional AS ini tidak dirancang secara eksplisit sebagai organisasi pendidikan melainkan organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan yang diyakini sebagai alat perdamaian. (Clark & Clark, 2018). Hal ini tercermin dalam tiga tujuan Peace Corps, yaitu : untuk membantu orang-orang dari negara-negara yang berkepentingan dalam memenuhi kebutuhan mereka akan laki-laki dan perempuan yang terlatih, untuk membantu mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang orang Amerika di pihak orang-orang yang dilayani, untuk membantu mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang orang lain di pihak orang Amerika (Peace Corps, 2020).

Relawan Peace Corps datang dari setiap negara bagian AS dan banyak universitas negeri memiliki hubungan perekrutan yang erat dengan Peace Corps. Peace Corps adalah lembaga pembangunan internasional dan diplomasi publik, beberapa Anggota juga berupaya memperkuat upaya lembaga tersebut untuk memperbaiki kondisi komunitas miskin di luar negeri dan persepsi negara lain tentang Amerika Serikat (Brown, 2019).

Di Indonesia sendiri program Peace Corps pernah dilaksanakan pada tahun 1963 yang kemudian terhenti pada tahun 1965. Dibuka kembali pada tahun 2006 (Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, 2017). Berdasarkan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Amerika Serikat Mengenai Program Peace Corps Di Indonesia yang dituangkan dalam Pengaturan Pelaksanaan Antara Kementerian Agama Republik Indonesia Dan Peace Corps Tentang Program Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah/Madrasah untuk Siswa dan Guru disepakati Program Peace Corps di Indonesia adalah Program Pengajaran Bahasa Inggris dan Pelatihan Guru Bahasa Inggris di Tiga Provinsi di Indonesia, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015).

Pembelajaran Bahasa Inggris oleh Relawan yang dilaksanakan di madrasah di

Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat tentunya melibatkan warga Amerika Serikat/Relawan Peace Corps dengan warga madrasah. Bahkan dalam Pengaturan Pelaksanaan pada poin 3 tentang Wilayah Kerja Sama dijelaskan bahwa Relawan dapat juga berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekunder madrasah dan di lingkungan masyarakat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015). Program Peace Corps ini erat kaitannya dengan pelaksanaan diplomasi publik yang didefinisikan sebagai komunikasi langsung dengan masyarakat asing yang memiliki tujuan untuk memengaruhi pemikiran masyarakat asing dan berakhir memengaruhi kebijakan pemerintahnya (Gilboa, Public Diplomacy, 2008, hal. 57).

Diplomasi publik merupakan salah satu instrumen kunci *soft power*, dan hal ini telah diakui dalam praktik diplomasi jauh sebelum perdebatan kontemporer mengenai diplomasi publik (Melissen, 2005, hal. 4). Diplomasi publik berarti menghasilkan *soft power*. Diplomasi publik disajikan sebagai kebijakan resmi yang menerjemahkan *soft power* ke dalam tindakan (Gilboa, Public Diplomacy, 2008, hal. 61).

Amerika Serikat (AS) memiliki banyak sumber daya yang berpotensi dapat memberikan kekuatan. Kekuatan (*Power*) --- *hard power* dan *soft power* --- ini yang menjadikan AS sebagai salah satu pemimpin global. Kepemimpinan global Amerika Serikat --- cenderung menjadi negara pertama, paling penting untuk mengidentifikasi atau meringkai isu-isu internasional, mengambil tindakan untuk mengatasi masalah global, memberi contoh bagi negara lain untuk diikuti, mengatur dan menerapkan upaya multilateral untuk mengatasi masalah internasional dan menegakkan aturan serta norma internasional (O'Rourke, 2021).

Namun, AS memiliki sejarah kelam yang berkaitan dengan hubungan antara Barat – AS dengan Timur – Muslim. Peristiwa 9/11, peristiwa yang seharusnya meningkatkan *power* dan simpati global terhadap AS malah menjadi titik balik kemunduran diplomasi dan citra AS di dunia. Kebijakan Presiden Bush saat itu langsung tertuju pada aksi/tindakan teroris.

Label “teroris” dengan cepat

diberikan kepada Muslim, sehingga menekankan stereotip bahwa teroris adalah Muslim (Powell, 2011). Islam merupakan agama yang didiskriminasi saat itu karena berkaitan erat dengan tindakan terorisme yang dengan mudah menghilangkan nyawa orang-orang yang tidak berdosa.

Dengan dalih teroris adalah muslim, maka pada tahun 2003 AS menginvasi Irak dengan mengerahkan kekuatan militernya sebagai respon terhadap peristiwa 9/11 --- dipandang sebagai tindakan terorisme --- lalu tindakan tersebut telah mengubah pandangan dunia terhadap citra AS sebagai negara pemimpin dunia yang senantiasa mendominasi keputusan global. Pandangan itu bergeser menjadi negara yang memiliki citra buruk bahkan melahirkan Gerakan Anti-Amerika akibat kebijakan yang diambil oleh Geogre W. Bush sebagai Presiden Amerika Serikat saat itu. Invasi yang dilakukan AS dinilai sebagai perbuatan yang semena-mena dan telah melanggar kedaulatan negara lain. Selain itu, target untuk memerangi terorisme nampaknya bergeser pada istilah Islam radikal karena AS memusatkan serangan militer terhadap negara-negara Muslim sehingga menyebabkan demonstrasi besar-besaran Anti-Amerika di negara-negara Muslim dari mulai Maroko, Pakistan hingga Indonesia (Zaharna, 2010).

Gerakan perang melawan teroris/*Global war on terror (GWOT)* bahkan bergeser maknanya menjadi sebuah gerakan untuk melegalkan tindakan kesewang-wenangan seperti frase “dicari, mati atau hidup” ketika AS memburu Osama Bin Laden, dan frase “apakah anda bersama kami atau bersama teroris”. Kesewang-wenangan ini mengubah citra AS khususnya Presiden Bush kala itu sebagai “*Cow Boy*”, terlebih AS “beraksi dimana-mana” sehingga muncul stereotip negatif sebagai negara yang sombong, memanjakan diri sendiri, munafik, lalai, dan tidak mau atau tidak mampu untuk terlibat dalam dialog lintas budaya (Zaharna, 2010).

Perhatian Pemerintah Amerika Serikat saat itu tidak hanya tertuju pada negara Afghanistan saja – ekstrimis Taliban, melainkan kepada semua negara yang berpotensi melahirkan ekstrimis Muslim, termasuk beberapa negara muslim yang ada di Asia Tenggara; Indonesia Malaysia dan Philipina (Ali, 2009). Indonesia sebagai negara dengan

jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia tentu memberikan respon negatif terhadap kebijakan luar negeri Presiden AS saat itu. Kebencian Muslim Indonesia terhadap Presiden George W. Bush saat itu kerap kali berdampak pada aspek lain. Misalnya pernyataan Presiden Bush dianggap telah menimbulkan gerakan Anti-Pemerintah AS dan menjalar pada gerakan Anti Amerika (Ali, 2009).

Sejak serangan teroris 9/11, diplomasi publik telah menjadi alat kebijakan luar negeri yang kuat untuk saling pengertian melalui komunikasi dua arah. Diplomasi publik membahas publik asing dan dengan demikian meningkatkan *soft power* suatu negara (Kim, 2017). Maka yang dilakukan AS adalah mengubah arah kebijakannya untuk memerangi tindakan terorisme dengan cara-cara yang lebih lembut seperti penggunaan diplomasi publik.

Keseriusan AS dalam hal diplomasi publik dibuktikan dengan adanya departemen atau lembaga khusus. Diplomasi publik AS dilakukan di bawah tanggung jawab Wakil Sekretaris Negara Untuk Diplomasi Publik dan Urusan Publik (*Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs*). Lembaga ini menangani keamanan nasional dengan memperluas dan memperkuat hubungan antara rakyat dan Pemerintah Amerika Serikat dan warga negara di seluruh dunia (U.S Departmen of State, 2023).

Diplomasi publik ini kemudian dilakukan dalam rangka memperbaiki citra AS di dunia internasional sekaligus menjalin hubungan jangka panjang dengan publik asing. Di samping itu, AS melibatkan masyarakat sipil dalam melaksanakan diplomasi publik. Seperti halnya Peace Corps, merupakan badan federasi Amerika Serikat yang bergerak di bidang sukarelawan. Program Peace Corps di Indonesia merupakan salah satu pelaksanaan diplomasi publik Amerika Serikat. Pengajaran Bahasa Inggris oleh Relawan adalah komunikasi langsung antara Relawan AS dengan warga sekolah/madrasah.

Durra, (2018) mengemukakan bahwa Amerika Serikat memiliki 14

Departemen dan sekitar 48 agen/badan khusus yang memiliki tugas dalam bidang diplomasi publik AS ke luar negeri. Diplomasi publik ini digunakan sebagai alat untuk memperkuat politik global dan ekonomi AS. Di masa Pemerintahan Presiden Obama, komunikasi dengan publik asing cukup intens dan erat terutama dengan penduduk Muslim di dunia. Durra mengemukakan Obama terjun langsung melalui pidatonya di Kairo, Mesir untuk merangkul warga Muslim dan memperjelas batasan perlawanan bagi para ekstremis muslim. Diplomasi publik pada prakteknya adalah bagaimana aktor bereaksi terhadap peristiwa berita, komunikasi proaktif dan kegiatan mengubah persepsi dan upaya membangun hubungan. Pada masa Presiden Obama, tujuan diplomasi publik yang berhubungan dengan Muslim adalah untuk mendukung demokrasi, HAM, perluasan pertukaran pelajar yang sangat efektif. Bahkan di tahun 2009 pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah mencapai angka 1,2 milyar dolar Amerika.

Kroenig, dkk (2013) mengemukakan bahwa pada pemerintahan Presiden George W. Bush, menggunakan *soft power* untuk menyampaikan suatu kampanye tertentu dianggap berhasil. Kampanye yang dimaksud seperti perang terhadap teroris, kampanye mengenai negara demokratis dan menentang kekuasaan absolut. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketertarikan dan dukungan warga Timur Tengah khususnya warga Irak terhadap kampanye Amerika Serikat dalam memerangi dan menumbangkan penguasa absolut dan juga terorisme. Akan tetapi, keberhasilan Amerika Serikat “mendapatkan hati” warga negara Irak diikuti dengan kegagalan AS dalam melakukan tindakan, AS melakukan tindakan yang tidak dibenarkan secara moral yakni melakukan invasi besar-besaran dengan tujuan ekonomi dan politik. “mendapatkan hati” rakyat Irak merupakan sebuah retorika dan aksi Presiden George W. Bush untuk melakukan invasi. Hal ini yang menjadikan AS sebagai negara yang dianggap melakukan tindakan tidak bermoral oleh dunia internasional dan mengharuskan membangun kembali citranya, terutama citra baik di Timur Tengah ataupun masyarakat Muslim pada umumnya. Menurut Kroenig ini bahwa keberhasilan *soft power* ditunjang dengan adanya “pasar” ide yang berfungsi, ketika pembawa pesan dan pesan dapat dipercaya, dan ketika sikap individu dapat

membentuk politik internasional, penerapan *soft power* memiliki peluang sukses yang masuk akal.

Seib, (2013) mengemukakan bahwa kebebasan beragama berhubungan erat dengan diplomasi publik. Amerika Serikat merupakan negara demokrasi yang menjunjung kebebasan beragama karena pada dasarnya agama merupakan salah satu faktor penentu yang kuat bagi individu maupun komunitas dalam menjalani kehidupan. Peran pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan yang berkaitan dengan hak hidup, kebebasan beragama, serta yang terpenting adalah menciptakan ketenteraman di dalam negeri. Pemerintah berusaha membangun opini publik domestik maupun asing terkait Islam dan Muslim yang ada di Amerika Serikat sebagai bagian dari negara dan tidak ada diskriminasi bagi Muslim baik itu warga negara muslim AS maupun para pendatang muslim dari berbagai belahan dunia. Artikel ini juga mengatakan adanya hubungan antara kebebasan beragama dengan diplomasi publik Amerika Serikat yaitu Pemerintah menciptakan regulasi mengenai kebebasan beragama dalam hal ini setara dengan kebebasan berpendapat sebagai satu kebijakan yang disampaikan ke publik domestik maupun asing melalui media yang dapat diakses oleh semua orang di dunia sehingga kebijakan mengenai kebebasan beragama dan berpendapat tersampaikan ke publik dengan baik.

YU, (2018) mengemukakan bagaimana upaya Amerika Serikat khususnya Presiden Barack Obama untuk membangun kembali citra dan membangun kepercayaan masyarakat Timur Tengah terhadap Amerika Serikat. Secara strategis, pemerintah AS mencoba memulai dari masyarakat sipil, aktor masyarakat publik baru, untuk memulihkan hubungan dengan masyarakat Arab; mereka menargetkan kaum muda dan wanita untuk melakukan komunikasi strategis, menggunakan media sosial dan teknologi informasi baru dan menerapkan program pertukaran internasional melalui organisasi nonpemerintah untuk mempromosikan strategi diplomasi publik ini.

Pembahasan dalam artikel ini berbeda dengan penelitian terdahulu di

atas, yaitu bagaimana program Peace Corps di Indonesia merupakan pelaksanaan diplomasi publik Amerika Serikat yang bertujuan untuk memperbaiki citra terutama pasca peristiwa 9/11 yang berdampak pada buruknya citra AS di mata Muslim Indonesia akibat kebijakan Presiden Bush menginvasi Irak di tahun 2003. Diplomasi publik yang dilakukan AS melibatkan warga Sipil sebagai perantara berkomunikasi dengan publik asing khususnya Indonesia. Peace Corps sebagai badan Independen Amerika Serikat adalah salah satu organisasi untuk menjalankan diplomasi publik AS melalui program-programnya di Indonesia.

METODE

Artikel penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan pada artikel ini berupa sumber data primer dan sekunder, yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber kunci, studi pustaka, dll. Lamont, (2015) penelitian kualitatif kerap menggunakan data berupa informasi yang didapat secara lisan melalui kegiatan wawancara dari berbagai narasumber. Narasumber pertama Pihak Peace Corps yaitu Relawan Peace Corps yang bertugas di MAN 1 Darussalam Ciamis, kedua, Pihak Madrasah yaitu Wakil Kepala Madrasah Bidang Pengembangan Kurikulum dan *counterpart* yaitu guru bahasa Inggris. Ketiga, Profesor Muhammad Ali sebagai Dosen Studi Islam di *University of California Riverside*. validitas data artikel ini menggunakan teknik triangulasi data. Objek penelitian dalam artikel ini yaitu, Peace Corps sebagai organisasi AS melakukan diplomasi publik di dunia termasuk Indonesia melalui Program Peace Corps.

HASIL DAN PEMBAHASAN

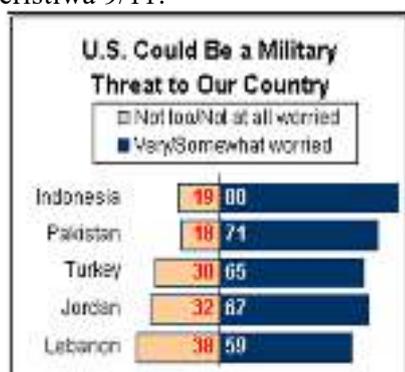
Diplomasi Publik Amerika Serikat di Indonesia

Pasca peristiwa 9/11 terdapat tantangan baru yang menjadikan diplomasi publik sangat dipengaruhi oleh tiga revolusi yang saling terkait yaitu revolusi dalam komunikasi dengan publik, revolusi politik dan revolusi hubungan internasional. Revolusi teknologi komunikasi sangat dipengaruhi oleh dua aspek, pertama

adalah internet yang mampu menyediakan informasi mengenai pemerintah, NGOs, komunitas internasional, perusahaan global, bahkan individu yang dapat memengaruhi keadaan dan situasi internasional., dan kedua oleh jaringan berita global seperti CNN Internasional, *Bbc World*, *Sky News*, *Al-Jazeera* yang mampu menyiarkan berita terkini atau siaran langsung ke seluruh dunia. revolusi dalam politik adalah perubahan dari pemerintahan yang autokrasi menuju pemerintahan yang demokrasi, yang melibatkan partisipasi rakyat dalam proses politik. Sedangkan revolusi dalam hubungan internasional adalah adanya perubahan maksud dan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Menciptakan citra dan reputasi baik di dunia internasional melalui ajakan dan daya tarik nilai, budaya adalah strategi yang sangat penting, kemudian disebut dengan *soft power*. Hal ini menyebabkan aktor negara atau non negara bertindak melalui kerjasama daripada paksaan, karena ketika kebijakan dan posisi negara atau non negara memiliki legitimasi moral atau dipandang sah di mata aktor negara lain maka *soft power* aktor tersebut telah meningkat (Gilboa, Public Diplomacy, 2008).

Amerika Serikat sebagai negara adidaya tentunya menjadi *role model* dalam hal diplomasi publik. Namun, peristiwa invasi AS ke Irak adalah bukti nyata titik balik kemunduran diplomasi AS di dunia, bagaimana tidak, tindakan perang dengan mengabaikan kedaulatan suatu negara menyebabkan kepercayaan dunia terhadap AS menurun, terutama kepercayaan negara-negara Islam dan negara dengan penduduk muslim di dunia akibat invasi yang dilakukan AS ke Irak telah menimbulkan gerakan Anti-Amerika dan ini bisa berbahaya bagi AS. Kebencian terhadap Pemerintah AS bahkan menjalar pada kebencian terhadap warga AS. Terutama negara muslim di dunia, mereka menganggap perbuatan invasi adalah hal yang tidak bisa dibenarkan dan telah mengancam kehidupan warga muslim AS dan muslim dun. Penelitian yang dilakukan badan independen *PEW Reasearch* mengenai seberapa besar tingkat ketakutan

negara muslim di dunia terhadap serangan militer atau invasi AS menunjukkan bahwa bagi negara dengan penduduk muslim di dunia menyatakan kekhawatirannya terhadap serangan militer AS pasca peristiwa 9/11. Berikut ini tabel data mengenai tingkat ketakutan terhadap serangan militer AS di dunia pasca peristiwa 9/11:



gambar 1: Ancaman Militer AS Bagi Negara-Negara Berpenduduk Muslim - <https://www.pewresearch.org/>

Bahkan kekhawatiran muslim di dunia turut berdampak pada hilangnya simpati terhadap Pemerintah AS dan orang Amerika itu sendiri. Maka peran diplomasi publik di sini sangat *urgent*, bagaimana Pemerintah dengan segala sumber yang dimiliki mengerahkan kekuatan untuk mengembalikan citra dan keharmonisan dengan negara muslim.

Departemen Luar Negeri AS menjadi pemimpin dalam mengembangkan dan menerapkan kampanye diplomasi publik Amerika yang menggabungkan radio, televisi, dan iklan media cetak dengan publikasi Internet, tour kuliah dan program penjangkauan lainnya. Badan Penyiaran Gubernur yang bertanggung jawab atas siaran radio dan televisi internasional AS meluncurkan siaran baru berbahasa Farsi, Pashtu, dan Arab, termasuk Radio Sawa yang banyak dipublikasikan pada tahun 2002 dan stasiun satelit Al-Hurra pada tahun 2004. Badan Internasional AS untuk pembangunan internasional (USAID) juga mulai bekerja lebih erat dengan Departemen Luar Negeri untuk menyoroti kontribusi amal Amerika sebagai sarana untuk meningkatkan citra Amerika (Zaharna, 2010).

Diplomasi publik dilihat sebagai instrumen penting dalam “mendapatkan hati dan pikiran” publik asing, serta meyakinkan mereka bahwa nilai-nilai, tujuan dan keinginan mereka (publik asing) sama dengan apa yang diinginkan

oleh Amerika Serikat. Pada masa Pemerintahan George W. Bush, Amerika Serikat mulai melakukan *rebranding* (mencap ulang) citranya sebagai negara “pengganggu global” menjadi Negara hegemon “yang penuh kasih sayang”. Tidak lain hal ini sebagai upaya untuk merangkul negara-negara Muslim atau sering disebut dengan *arab street*. Dengan diplomasi publik, maka terjadi perubahan strategi yang dilakukan Bush untuk merangkul kembali negara Muslim dengan menggunakan *tagline* baru berupa ajakan untuk memerangi aksi teror (*war on terror*) dan terorisme (Melissen, 2005, hal. 49).

Membentuk citra atau *rebranding* cap negara bukanlah hal mudah, diperlukan strategi yang komprehensif. Kemudian konsep diplomasi publik menjadi salah satu konsep yang menarik dipakai untuk melakukan hal itu semua, kemudian pertimbangan lain berupa sumber *soft power* yang dimiliki. Amerika Serikat sebagai negara yang kaya akan sumber *soft power* sangat paham betul bahwa diplomasi merupakan instrumen penting sehingga tidak heran jika Amerika Serikat (AS) betul-betul fokus pada praktek diplomasi untuk menciptakan hegemoninya di regional. Kawasan yang menjadi fokus AS adalah Negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara.

Diplomasi publik tidak hanya dilakukan secara sempit oleh Kantor Urusan Publik/*Public Affairs Office*. Akan tetapi Duta Besar melakukannya. USAID melakukannya. Peace Corps melakukannya. Kesehatan Masyarakat melakukannya. Diplomasi publik diterima secara luas sebagai alat utama untuk semua operasi Kedutaan dan kegiatan *people-to-people* tidak hanya dilakukan oleh Bagian Urusan Publik tetapi bagian lain dari Kedutaan dan Duta Besar. Misalnya, USAID mendanai beberapa program hubungan universitas antara lembaga pendidikan tinggi AS dan Indonesia sebagai prakarsa baru dan program pengajaran bahasa Inggris Peace Corps tentu saja mempromosikan pendidikan dan pertukaran orang-ke-orang dalam arti luas (Rugh, 2014, hal. 62).

Selain itu, pelaksanaan diplomasi publik juga melibatkan agen khusus,

berkaitan dengan informasi yang akan disampaikan kepada publik domestik maupun publik asing dalam mempromosikan AS. USIA (*United States Information Agency*) yang selanjutnya populer dengan nama USIS (*United States Information Service*) adalah agen Pemerintah AS yang bertanggung jawab atas pelaksanaan diplomasi publik dalam bidang penyampaian informasi kepada publik asing. USIA dipimpin oleh seorang Direktur, seorang Wakil Direktur, dan tiga Wakil Direktur yang memimpin biro utamanya: Biro Penerangan, Biro Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, dan Biro Manajemen. Kantor pendukung USIA termasuk Kantor Penghubung Publik, Kantor Penasihat Umum, dan Kantor Riset dan Reaksi Media. Kantor Riset dan Reaksi Media melakukan kegiatan jajak pendapat dan juga menyediakan analisis harian opini pers luar negeri tentang kebijakan luar negeri AS. Kantor urusan regional USIA mendukung dan mengoordinasikan kegiatan di lapangan (Nakamura & Weed, 2009).

Biro Informasi memproduksi dan mendistribusikan ke kantor-kantor USIS di lapangan berbagai publikasi dalam 30 bahasa yang mendukung tujuan kebijakan AS, seperti penjelasan tentang kebijakan narkoba AS. Biro juga menerbitkan buku dan pamflet yang memberikan informasi tentang sejarah, politik, ekonomi, dan budaya AS, dan mengadopsi teknologi baru untuk penyampaian informasi. Biro memanfaatkan teknologi baru saat tersedia, seperti teletype, untuk memindahkan materi informasi ke lapangan (Nakamura & Weed, 2009, hal. 10).

Dalam kerangka *Comprehensive Partnership* antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat yang diluncurkan pada tahun 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Barrack Obama, pada tanggal 18-19 Februari 2009, telah dilakukan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia membahas *Comprehensive Partnership* serta kesiapan Amerika Serikat untuk mengirimkan kembali Peace Corps ke Indonesia. kerjasama yang dimaksud yaitu pengiriman relawan ke Indonesia yang dimulai dengan adanya penandatanganan perjanjian Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Desember 2009, sedangkan dokumen

Pengaturan Pelaksanaan/Implementing Arrangement (IA) telah ditandatangani oleh Peace Corps, Kementerian Pendidikan Nasional (kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), dan Kementerian Agama pada tanggal 15 Juni 2011 yang kemudian diperbarui pada tanggal 23 Februari 2015 (Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, 2013).

Program Peace Corps Di Indonesia Tahun 2016-2020

Program Peace Corps pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa Orde Lama melalui MoU yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1963 dan mulai dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1963. Program ini kemudian berhenti pada tahun 1965, namun pembicaraan mengenai Peace Corps kembali dibuka pada tahun 2006 ketika Pemerintah Amerika Serikat, melalui Duta Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, menyampaikan tawaran program Peace Corps kepada Pemerintah Indonesia. Melalui surat Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 6461/M.PPN/10/2006 kepada Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta dan surat No. 6463/M.PPN/10/2006 tanggal 31 Oktober 2006, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan penghargaan dan membuka diri terhadap kerjasama internasional sekaligus mengundang Peace Corps untuk membangun kembali programnya di Indonesia (Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, 2017).

Setiap relawan yang ditugaskan diberi masa kerja selama paling lama dua puluh tujuh bulan. Tugas relawan sebagaimana yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini Peace Corps adalah program Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Guru dan Siswa di sekolah atau madrasah di tiga Provinsi, Jawa Barat Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

Selama berada di tempat tugas, setiap relawan berkewajiban untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana dokumen Pengaturan dan Pelaksanaan, di antaranya,

Relawan harus mampu memahami pengajaran Bahasa Inggris dengan cara mengamati kelas, wawancara dan meninjau bahan ajar, meninjau sumber daya yang digunakan dalam pengajaran Bahasa Inggris saat ini (misalnya, standar, kurikulum, buku teks, audio-visual dan sumber daya TIK, alat penilaian. Selain itu, relawan juga dituntut untuk bekerjasama dengan Guru sekolah/madrasah untuk menyusun strategi dan bahan pengajaran di kelas, dll. Hal yang paling penting adalah relawan dituntut untuk terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan berbasis masyarakat seperti klub bahasa Inggris, olahraga, kepanduan, program lingkungan dan teater.

Kerjasama yang disepakati antara Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 2009 terus berjalan sampai saat ini. Bahkan kerjasama yang dijalin melalui Kementerian terkait yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama telah dilaksanakan di akar rumput pada tingkat sekolah atau madrasah. Pada bulan Maret tahun 2016 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Darussalam Ciamis menjalin kerjasama bersama dengan Lembaga Pemerintah Amerika Serikat tersebut. Para Relawan yang berkewarganegaraan Amerika Serikat didatangkan ke Indonesia dan ditempatkan di beberapa daerah di Indonesia. Seorang Relawan bernama Talia Mindich ditunjuk oleh Peace Corps untuk bertugas di MAN 1 Darussalam Ciamis Jawa Barat. Talia adalah panggilan akrabnya sebagai warga asing yang pernah tinggal di Kabupaten Ciamis, terutama di lingkungan MAN 1 Darussalam Ciamis yang beralamat di Jln. Kyai Ahmad Fadlil 2 Dusun Kandang Gajah Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Talia pernah bekerja sebagai Penyelidik Latar Belakang di Capitol Hill untuk Departemen Pertahanan dan bertugas selama dua tahun di Peace Corps di sebuah pesantren di Jawa Barat, Indonesia. Talia memperoleh gelar BA dalam Sastra Inggris dari Kenyon College, dan dibesarkan di Burlington, Vermont (Mindich, 2022).

Setiap relawan yang ditugaskan diberi masa kerja selama paling lama dua puluh tujuh bulan. Tugas relawan sebagaimana yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini Peace Corps adalah program Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Guru dan Siswa di sekolah atau

madrasah di tiga Provinsi, Jawa Barat Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Selama berada di tempat tugas, setiap relawan berkewajiban untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana dokumen Pengaturan dan Pelaksanaan, di antaranya, Relawan harus mampu memahami pengajaran Bahasa Inggris dengan cara mengamati kelas, wawancara dan meninjau bahan ajar, meninjau sumber daya yang digunakan dalam pengajaran Bahasa Inggris saat ini (misalnya, standar, kurikulum, buku teks, audio-visual dan sumber daya TIK, alat penilaian (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015). Selain itu, relawan juga dituntut untuk bekerjasama dengan Guru sekolah/madrasah untuk menyusun strategi dan bahan pengajaran di kelas, dll. Hal yang paling penting adalah relawan dituntut untuk terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan berbasis masyarakat seperti klub bahasa Inggris, olahraga, kepanduan, program lingkungan dan teater. Program ini berlangsung di MAN 1 Darussala selama kurang lebih 4 tahun sejak 2016-2020 (Imas, 2022).

Berkaitan dengan Diplomasi Publik, Gilboa telah membagi diplomasi publik ke dalam tiga bagian serta memberikan struktur analisisnya untuk mengkaji praktek diplomasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah atau non pemerintah (Gilboa, Public Diplomacy, 2008).

Diplomasi publik juga bergantung pada sikap proaktif dalam menciptakan kegiatan dan acara yang layak diberitakan yang dirancang untuk memperkuat pesan inti yang diharapkan serta dapat memengaruhi persepsi audien yang ditargetkan. Hal ini tentunya membutuhkan upaya harian terhadap peristiwa atau berita yang sedang terjadi sesuai dengan tujuan strategis negara maka manajemen berita sangatlah penting dan harus lebih reaktif, fleksibel dan tersebar secara luas. Misalnya saja penggunaan situs web resmi milik Peace Corps secara intens mengabarkan berita mengenai kegiatan Peace Corps:



gambar 2: <https://id.usembassy.gov/>

Pada prakteknya, diplomasi langsung ini senantiasa berlangsung dalam kurun waktu yang relatif singkat yaitu beberapa jam atau beberapa hari saja, tujuannya adalah sebagai bentuk reaksi atau respon cepat terhadap isu atau peristiwa yang sedang terjadi. Diplomasi ini berkaitan erat dengan pengelolaan berita dan media. Baik itu media massa maupun media sosial. Media dalam hal ini sebagai saluran komunikasi yang sangat penting serta saluran untuk menyampaikan informasi.

Dalam penelitian ini berkaitan dengan Peace Corps sebagai salah satu lembaga AS yang menjalankan diplomasi publik di dunia dengan berbagai cara, seperti penggunaan laman resmi, pertukaran budaya, penempatan relawan di berbagai belahan dunia. Penggunaan laman resmi adalah salah satu strategi untuk menyebarkan berita tentang organisasi ini, misalnya rencana kedatangan kembali relawan Peace Corps ke Indonesia yang dimuat di laman resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat. Bahkan lebih spesifik dimuat juga di laman resmi Peace Corps untuk menyebarkan berita mengenai program Peace Corps di seluruh dunia khususnya di Indonesia yang sempat terjadi kekosongan relawan akibat Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia.

Peace Corps sendiri berada di bawah pengawasan dan koordinasi Kedutaan Besar Amerika Serikat sehingga dalam menjalankan diplomasi langsung ini peran Pemerintah Amerika Serikat sangat erat kaitannya. Pemerintah Amerika Serikat yang direpresentasikan oleh Kedutaan Besarnya di Jakarta berkomitmen dengan Pemerintah Indonesia untuk mengirim kembali Relawan Peace Corps yang bertugas sebagai pangajar Bahasa Inggris untuk guru dan siswa di sekolah/madrasah di tiga Provinsi yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

Pada tingkatan diplomasi level langsung, penggunaan laman resmi pemerintah AS, apakah itu laman Resmi Kedutaan AS yang ada di Jakarta atau Laman Resmi Peace Corps Indonesia adalah salah satu respon cepat yang dapat dilakukan berkaitan dengan satu isu penting, di kasus ini mengenai program Peace Corps yang akan dimulai kembali pada tahun 2023.

Selanjutnya adalah diplomasi publik jangka menengah, Pada tingkatan ini, pelaksana diplomasi publik membutuhkan lebih banyak waktu. Gilboa menyebutkan dalam kerangka analisisnya bahwa waktu pada tingkatan ini membutuhkan waktu beberapa minggu atau beberapa bulan. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan diplomasi jangka menengah adalah tindakan proaktif dalam merencanakan serta mengimplementasikan kebijakan. Teknik yang dipakai dalam melaksanakan diplomasi ini berupa komunikasi strategis dengan publik asing agar dapat mencapai kepentingan utama yang diharapkan, baik oleh pemerintah/lembaga pemerintah negara ataupun kombinasi dengan lembaga non pemerintah. Instrumen diplomasi publik yang tepat adalah melalui diplomasi publik diaspora yang dilakukan oleh para diaspora yang ada di negara lain.

Diaspora disini adalah para imigran yang datang ke negara lain dengan maksud dan tujuan tertentu, seperti bekerja, perpindahan penduduk akibat perang di negara asalnya, atau pekerja profesional yang dibutuhkan oleh negara penerima. Selain itu, bisa juga melalui firma hubungan masyarakat berupa perusahaan yang bergerak khusus dalam bidang hubungan masyarakat atau bahkan pelobi yang handal untuk menjalan diplomasi publik di negara tujuan. Baik firma hubungan masyarakat dari luar negara tersebut/asing atau dapat juga firma hubungan masyarakat lokal atau berasal dari negara tersebut. Instrumen tersebut di atas tentunya terhubung secara tidak langsung dengan Pemerintah Asing, dalam kasus ini misalnya dari Amerika Serikat.

Namun pada tahun 2009, Presiden AS Barack Obama terjun langsung

melakukan diplomasi publik. Pidato Obama di Kairo pada Juni 2009 dipandang sebagai upaya untuk membangun kembali hubungan antara AS dan dunia Muslim. Dalam pidatonya, Obama mengatakan “Siklus kecurigaan dan perselisihan ini harus diakhiri. Saya datang ke sini untuk mencari awal baru antara Amerika Serikat dan Muslim di seluruh dunia; berdasarkan kepentingan bersama dan saling menghormati”. Pidato itu disampaikan untuk menarik langsung audiens yang ditargetkan yang dibumbui dengan ayat-ayat Al-quran dan pesan-pesan tentang isu-isu kepekaan budaya dan politik bagi umat Islam. Bangkitnya kekuatan ISIS di Irak dan Suriah pada tahun 2014, membuat pemerintahan Obama menganggap “ancaman terbesar terhadap keamanan AS berasal dari kelompok Islam radikal”. Obama mengatakan “Tujuan kami jelas: Kami akan menurunkan, dan pada akhirnya menghancurkan ISIL melalui strategi kontra-terorisme yang komprehensif dan berkelanjutan (Durra, US Public Diplomacy Efforts During Obama’s Administration to Combat Islamic Extremist, 2018).

Kaitannya dengan diplomasi publik jangka panjang, Eytan Gilboa memaparkan bahwa diplomasi jenis ini merupakan diplomasi paling mirip dengan diplomasi publik tradisional. Ini dirancang untuk menghasilkan sikap suportif/dukungan di antara publik di seluruh dunia. Dukungan Amerika Serikat melalui Relawan Peace Corps sangat relevan dengan apa yang dijelaskan Gilboa mengenai beberapa struktur diplomasi publik yang dapat dianalisis. Program Peace Corps di Indonesia ialah Program Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Siswa dan Guru di sekolah/madrasah di Indonesia membutuhkan upaya bertahun-tahun untuk membangun rasa saling percaya dan kondisi yang menguntungkan untuk hubungan persahabatan dengan negara dan aktor non-negara.

Setiap tahunnya Relawan Peace Corps terus didatangkan ke Indonesia guna menjalankan tugas sebagai pengajar bahasa Inggris di sekolah atau madrasah. Sebagaimana Gilboa sebutkan, program seperti ini adalah bertujuan untuk membangun hubungan yang menguntungkan dalam hal ini antara warga Indonesia dengan warga Amerika Serikat. Terlebih tujuan daripada Organisasi Peace Corps sejak didirikannya ialah menyediakan bantuan teknis bagi negara yang membutuhkan, serta yang paling penting ialah bagaimana

Warga Amerika Serikat bisa memahami dan belajar langsung ke daerah-daerah di Indonesia mengenai sosial, budaya dan lingkungan sekitar. Begitu juga sebaliknya, bagaimana Warga Indonesia dapat mengenal dan memahami dari dekat Warga Amerika Serikat bahkan dapat berkomunikasi secara langsung dengan warga asing.

Peace Corps sebagai organisasi Independen Amerika Serikat sangat tepat sebagai media untuk menghimpun opini publik Indonesia. Pasalnya, program yang dilaksanakan adalah program jangka panjang yang harus dikelola dengan baik untuk menghasilkan program unggulan yang tepat sasaran serta dapat memenuhi tujuan di samping sebagai suatu organisasi independen, Peace Corps melibatkan warga sipil sebagai pelaksana tugas-tugas tersebut sehingga akan lebih mudah membaur dengan warga Indonesia sebagai sesama warga sipil. Sedangkan Pemerintah Amerika Serikat sendiri dapat mengatur dari jauh terkait keberlangsungan program-program Peace Corps. Di Indonesia, Peace Corps berada di bawah pengawasan dan koordinasi Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta meskipun kantor Peace Corps Indonesia sendiri bertempat di Surabaya, akan tetapi peran Kedutaan Besar Amerika Serikat sangat besar bagi keberlangsungan program Peace Corps.

Selain itu, instrumen diplomasi publik yang tepat menurut Gilboa adalah diplomasi budaya, pertukaran internasional serta branding. Para Relawan Peace Corps yang tersebar di tiga provinsi di Indonesia merupakan implementasi diplomasi budaya, pertukaran internasional serta upaya membangun citra baik di kalangan masyarakat Indonesia. Melalui interaksi yang dilakukan oleh Relawan Peace Corps, warga Indonesia khususnya warga MAN 1 Darussalam Ciamis dan warga sekitar madrasah sedikit banyak dapat belajar dan memahami budaya Amerika Serikat, begitu juga sebaliknya, relawan banyak belajar mengenai budaya, kebiasaan warga madrasah dan sekitar madrasah.

Di samping itu, Peace Corps memiliki 3 tujuan. Pertama membantu negara penerima dalam memenuhi

kebutuhan akan relawan terlatih. Tujuan pertama ini dituangkan melalui Program Peace Corps di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia sendiri telah menjalin kerjasama dengan Peace Corps. Relawan mendukung komunitas tuan rumah (*host country*) di setiap wilayah di dunia dengan program bantuan di bidang pertanian, pembangunan ekonomi, pembangunan pemuda, kesehatan (khususnya program HIV/AIDS), dan pendidikan. Sekitar 42% Relawan bekerja di bidang pendidikan dan merupakan sektor programatik terbesar serta sekitar 46% melayani di Afrika sub-Sahara (Brown, 2019).

Kedua mempromosikan kesepahaman warga Indonesia terhadap relawan AS. Pandangan negatif/citra negatif Pemerintah AS-kemudian menjadi citra buruk Amerika Serikat (segala yang berkaitan dengan AS) warga Indonesia tentunya perlu diperbaiki. Upaya Pemerintah AS untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan warga Indonesia khususnya Muslim Indonesia dilakukan dengan cara-cara yang sangat menarik perhatian dibandingkan dengan kekerasan. Adanya Relawan Peace Corps di lingkungan sekolah/madrasah tentu sangat berpengaruh pada hubungan dan citra AS itu sendiri. Komunikasi yang dilakukan Relawan setiap hari bahkan membentuk hubungan yang harmonis dan jangka panjang. Misalnya di MAN 1 Darussalam Ciamis, siswa dan guru senantiasa menjalin hubungan dan berkomunikasi secara berkala dengan Relawan yang pernah bertugas di madrasah tersebut (Imas, 2022).

Ketiga, adalah mempromosikan kesepahaman warga AS terhadap warga Indonesia. Tujuan kedua dan ketiga Peace Corps menggambarkan diplomasi publik juga. Relawan dikirim ke negara penerima (*host country*) untuk melaksanakan program yang dirancang oleh Peace Corps. Program ini berdampak tidak hanya kepada warga Indonesia saja melainkan informasi tentang Indonesia juga turut diserap oleh Relawan Peace Corps. Misalnya pada tanggal 7 Desember 2017, Relawan Peace Corps Indonesia, William Glasscock kembali dari Indonesia dan memberikan presentasi tentang Indonesia dan pengalamannya kepada kelompok pria di gerejanya (Gereja Kristen Pertama di Winchester, KY). Ada sekitar 40 orang yang hadir. Dalam presentasinya ia berbicara tentang

Indonesia, sejarahnya, kehidupan sehari-hari yang ia alami dan keragaman budaya dan agama di negara ini. Dia juga berbicara tentang peran Islam di Indonesia dan bagaimana rasanya tinggal di negara mayoritas Muslim. Hal ini sangat penting karena sebagian besar orang di ruangan itu memiliki sedikit atau tidak sama sekali pengetahuan tentang Islam dan banyak yang memiliki pertanyaan tentang aspek kehidupan Indonesia tersebut (Peace Corps Indonesia, 2017).

Tujuan kedua dan ketiga Organisasi Peace Corps menggambarkan diplomasi publik Amerika Serikat yang dituangkan dalam Program Peace Corps di Indonesia. Program yang disepakati keduanya adalah Program Pengajaran Bahasa Inggris di Sekolah/Madrasah di tiga Provinsi di Indonesia, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berdampak pada terbentuknya citra baik mengenai AS dan terjalinnya hubungan harmonis antara warga Indonesia dengan warga Amerika Serikat.

SIMPULAN

Peace Corps sebagai badan Pemerintah AS berperan penting melaksanakan diplomasi publik. Program Pembelajaran Bahasa Inggris untuk siswa dan guru di sekolah/madrasah oleh Relawan Peace Corps adalah pelaksanaan diplomasi publik di Indonesia yang berdampak pada hubungan dan citra AS di Indonesia. Program ini memberikan pemahaman mengenai informasi Amerika Serikat di mata masyarakat Indonesia dan memberikan pemahaman pula mengenai informasi Indonesia di mata warga AS sebagaimana tertuang dalam tiga tujuan Peace Corps yang menggambarkan pelaksanaan diplomasi publik. Program ini merupakan program jangka panjang yang dapat menciptakan hubungan harmonis antara AS dengan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, M. (2009). *Bridging Islam and The West : An Indonesia View*. Jakarta: Ushul Press.
- Melissen, J. (2005). *The New Public Diplomacy : Soft Power In International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.
- Rugh, W. A. (2014). *Front Line Public Diplomacy How US Embassies Communicate with Foreign Publics*. New York: PALGRAVE MACMILLAN.
- Zaharna, R. (2010). *Battles to Bridges U.S. Strategic Communication and Public Diplomacy after 9/11*. London: Palgrave Macmillan.

JURNAL

- Brown, N. M. (2019). *The Peace Corps: Overview and Issues*. New York: Congressional Research Service.
- Clark, B., & Clark, K. (2018). Peace Corps Volunteers as Teachers of English. *John Wiley & Sons, Inc.*, 1.
- Durra, Z. J. (2018). US Public Diplomacy Efforts During Obama's Administration to Combat Islamic Extremist. *Communication and Public Diplomacy*.
- Gilboa, E. (2008). Public Diplomacy. *The International Encyclopedia of Political Communication*, 57.
- Gilboa, E. (2015). Public Diplomacy. *The International Encyclopedia of Political Communication*, 3.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Pengaturan Pelaksanaan Antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Peace Corps Tentang Program Peace Corps Dalam Bidang Pengajaran Bahasa Inggris dan Pelatihan Guru Bahasa Inggris*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan .
- Kim, H. (2017). Bridging the Theoretical Gap between Public Diplomacy and Cultural Diplomacy. *The Korean Journal of International Studies*, 293.
- Kroenig, M., Adam , M., & Weber, S. (2013). *Taking Soft Power Seriously. Comparative Strategy*.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods In International Relations*. Los Angeles: Sage .

- Nakamura, K. H., & Weed, M. C. (2009). *U.S. Public Diplomacy: Background and Current Issues*. Congressional Research Service.
- O'Rourke, R. (2021). U.S. Role in the World: Background and Issues for Congress. *Congressional Research Service*, 4.
- Powell, K. A. (2011). Framing Islam: An Analysis of U.S. Media Coverage of Terrorism Since 9/11. *Communication Studies*, 96.
- Rostami, N. (2014). Public Diplomacy; Tools Of Power In Foreign Policy; (Case Study: Application Of Public Diplomacy In Foreign Policy Of United States Of America). *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 189.
- Seib, P. (2013). Religious Freedom And US Public Diplomacy. *The Review of Faith & International Affairs*.
- YU, Z. (2018). Citizen Diplomacy–New US Public Diplomacy Strategy in the Middle East under the Obama Administration. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*.

Interview

- Imas, M. (2022, Desember 30). Program Peace Corps Tentang Pengajaran Bahasa Inggris di Sekolah/Madrasah Sebagai Diplomasi Publik di Indonesia. (D. Natadiwangsa, Interviewer)
- Mindich, T. (2022, November 2). Diplomasi Publik Amerika Serikat di Indonesia Melalui Program Peace Corps. (D. Natadiwangsa, Interviewer)

Artikel Online

- Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas. (2017). *Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps Di Indonesia Tahun 2016*. Jakarta: Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas.
- Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas. (2013). *Laporan Akhir Kegiatan*

- Tahun 2012: Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia.* Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- U.S Department of State. (2023, Januari 16). *USA Government*. Retrieved from Executive Department Sub-Office/Agency/Bureau-Public Diplomacy and Public Affairs: <https://www.usa.gov/federal-agencies/public-diplomacy-and-public-affairs>
- Peace Corps. (2020). *Annual Report*. Surabaya: Peace Corps Indonesia.
- Peace Corps. (2022). *Strategic Plan And Annual Performance Plan*. Washington DC: Peace Corps Government.
- Peace Corps Indonesia. (2017). *Annual Report*. Surabaya: Peace Corps Indonesia.